

Penerapan Akuntansi Lingkungan pada Badan Usaha Milik Desa untuk Mewujudkan *Green Accounting* (Studi Kasus pada Badan Usaha Milik Desa [BUMDes] Jaya Mulya, Desa Situmulya, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten)

Suprianto
Universitas Nusa Putra

Suprianto_ak21@nusaputra.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan akuntansi lingkungan pada BUMDes Jaya Mulya Desa Situmulya dalam mewujudkan *Green Accounting*. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik wawancara, observasi dan telaah dokumen laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaporan keuangan BUMDes masih berfokus pada aspek ekonomi (profit) dan belum mengintegrasikan aspek lingkungan (planet) secara memadai. Berbagai dampak lingkungan dari aktivitas usaha, seperti limbah kertas, plastik dan peternakan belum diidentifikasi maupun dicatat sebagai biaya lingkungan. Sementara itu, aspek sosial (people) telah terlaksana melalui kontribusi terhadap alokasi PADes, bagi hasil usaha dan insentif pengurus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan *Green Accounting* pada BUMDes Jaya Mulya belum optimal sehingga diperlukan pengembangan kebijakan, pencatatan biaya lingkungan serta peningkatan kapasitas pengelola untuk mendukung tata kelola usaha yang berkelanjutan.

Kata Kunci : *Akuntansi Sosial, Green Accounting, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*

Abstract: This study aims to analyze the application of environmental accounting in BUMDes Jaya Mulya Situmulya Village in realizing *Green Accounting*. The method used is qualitative research with interview, observation and analysis techniques of financial statement documents. The results of the study show that the financial reporting system of BUMDes still focuses on the economic aspect (profit) and has not adequately integrated the environmental (planetary) aspect. Various environmental impacts of business activities, such as paper, plastic and livestock waste, have not been identified or recorded as environmental costs. Meanwhile, the social (people) aspect has been implemented through contributions to the allocation of PADes, business profit sharing and management incentives. This study concludes that the implementation of *Green Accounting* in BUMDes Jaya Mulya is not optimal, so it is necessary to develop policies, record environmental costs and increase the capacity of managers to support sustainable business governance.

Keyword : *Environmental Accounting, Green Accounting, Village-Owned Enterprises (BUMDes)*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan entitas ekonomi yang didirikan oleh pemerintah desa dengan tujuan mengoptimalkan potensi lokal demi kesejahteraan masyarakat. Sebagai pilar ekonomi kerakyatan, BUMDES diharapkan mampu menjalankan fungsi komersial sekaligus fungsi sosial secara beriringan. Menurut Reza et al., (2025) Peran Strategis Kemitraan BUMDes dalam Pembangunan Desa Berkelanjutan di Indonesia diperlukan karena kemitraan yang efektif antara BUMDes dan berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan. Hal ini menempatkan BUMDES pada posisi strategis dalam struktur ekonomi nasional yang berbasis pada pemberdayaan akar rumput.

Namun, seiring dengan berkembangnya unit-unit usaha di tingkat desa, tantangan baru muncul terkait keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup. Aktivitas ekonomi yang masif, jika tidak dikelola dengan prinsip berkelanjutan, berisiko merusak sumber daya alam yang menjadi aset utama desa itu sendiri. Dalam penelitian Kurniawan & Mustofa, (2022) menjelaskan badan ini dituntut menjalankan fungsi ekonomi dan sosial, tidak mengejar keuntungan semata tetapi juga tidak boleh merugi agar usaha BUM Desa dapat berkelanjutan.

Dalam konteks inilah konsep *Green Accounting* atau akuntansi lingkungan menjadi relevan untuk diimplementasikan. *Green Accounting* merupakan praktik akuntansi yang mengintegrasikan biaya-biaya lingkungan ke dalam laporan keuangan organisasi sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan.

Penelitian oleh Pratiwi, (2013) mengungkapkan bahwa masyarakat semakin menyadari bahwa muncul dampak-dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya untuk mencapai laba yang maksimal. Dengan demikian perusahaan dituntut untuk mengalokasikan labanya untuk bertanggungjawab terhadap lingkungan.

Urgensi penerapan akuntansi lingkungan pada BUMDES Jaya Mulya di Desa Situmulya, Kecamatan Cibeber, sangat dipengaruhi oleh karakteristik unit usahanya yang berdampak terhadap lingkungan diantaranya jasa listrik, budidaya ikan dan ternak domba. Fenomena di lapangan seringkali menunjukkan bahwa limbah operasional atau sisa aktivitas usaha belum terkelola secara sistematis dalam catatan keuangan. Dengan demikian, Entitas sudah seharusnya melakukan konservasi lingkungan untuk meminimalisir dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas operasinya (Suningsih et al., 2021).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana kesiapan dan komitmen BUMDES Jaya Mulya dalam mewujudkan tata kelola *Green Accounting*. Analisis kesiapan ini mencakup aspek sumber daya manusia, dukungan regulasi internal desa, serta ketersediaan biaya yang dikeluarkan untuk perawatan lingkungan. Biaya lingkungan adalah biaya yang dikeluarkan akibat dampak dari aktivitas-aktivitas lingkungan yang dilakukan perusahaan (Lalo & Hamiddin, 2021).

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi BUMDES Jaya Mulya dalam memperbaiki model pelaporan keuangannya agar tidak hanya

berorientasi pada laba (*profit*), tetapi juga peduli pada pelestarian bumi (*planet*). Sinergi antara ekonomi dan ekologi melalui jalur akuntansi ini diharapkan mampu menciptakan model BUMDES yang tangguh dan lestari.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi Lingkungan dan *Green Accounting*

Pengertian akuntansi lingkungan menurut *United States Environmental Protection Agency (US-EPA)* *Environmental accounting in this context refers to the estimation and public reporting of environmental liabilities and financially material environmental costs.* Konsep ini menjelaskan bahwa akuntansi lingkungan sebagai alat pencatatan dan pelaporan keuangan yang jujur berfokus pada kegiatan hitung-hitungan yang berkaitan dengan alam. Ketika sebuah organisasi atau badan usaha melakukan aktivitas yang berdampak pada lingkungan, mereka wajib memperkirakan atau menaksir berapa biaya nyata atau tanggungjawab yang harus diselesaikan. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan kepada publik mengenai seberapa besar biaya materi yang dihabiskan untuk urusan lingkungan khususnya untuk mencatat apa yang sudah atau sedang terjadi dalam bentuk laporan keuangan.

Sedangkan Bell dan Lehman, (1999) dalam Kusumaningtias, (2013), mendefinisikan "*Green accounting is one of the contemporary concepts in accounting that support the green movement in the company or organization by recognizing, quantifying, measuring and disclosing the contribution of the environment to the business process.*" Dari penjelasan ini *Green Accounting* bukan sekedar urusan catat-mencatat uang saja, melainkan sebuah gerakan perubahan nyata untuk menyelamatkan lingkungan. Konsep *Green Accounting* ini menuntur organisasi untuk

menjadikan akuntansi sebagai pendukung utama gerakan ramah lingkungan dalam seluruh proses bisnis mereka. Jika akuntansi lingkungan fokus pada pelaporan secara pasif, maka *Green Accounting* sifatnya lebih aktif dan peduli pada masa depan ekosistem.

Sedangkan menurut pendekatan kerangka akuntansi *triple bottom line accounting*, pelaporan akuntansi lingkungan meliputi tiga aspek lingkungan, sosial dan keuangan. "*triple bottom line*" focusing in *economic prosperity, environmental quality, and the element which business had preferred to overlook social justice* (Elkington, 2001).

Konsep ketiga aspek tersebut digambarkan pada gambar 1 sebagai berikut :



Gambar 1. Pendekatan Triple Bottom Line Accounting

Sumber : 3 pillars of sustainability and the triple bottom line (Zenbird.media, 2025)

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa keberlanjutan (*sustainability*) hanya bisa dicapai jika perusahaan memiliki kesadaran etis untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang kemudian didukung oleh sistem pencatatan akuntansi yang mampu memotret realitas interaksi manusia dengan alam secara akurat.

Berdasarkan *triple bottom line accounting* tersebut, maka pelaporan akuntansi tidak

hanya pada aspek keuangan saja, akan tetapi meliputi aspek non keuangan yaitu aspek sosial dan aspek lingkungan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap potensi timbulnya dampak terhadap sosial dan lingkungan atas pelaksanaan proses bisnis. Pada perkembangannya, konsep akuntansi lingkungan (*environmental accounting*) berkembang menjadi *green accounting*, dalam konsep *green accounting* ini lingkupnya menjadi lebih luas tidak hanya pada aspek penyajian (pertanggungjawaban) dan pengungkapan biaya yang memiliki dampak pada lingkungan, tapi juga meliputi satu siklus akuntansi yang berpotensi berdampak pada lingkungan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa dinyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat (Permendagri Nomor 39 Tahun 2010). Pembentukan BUMDes telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu UU 6/2014 Tentang Desa Pasal 87,88,89 dan 90. Pasal 87 ayat (1) desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa, (2) BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, (3) BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 88 ayat (1) Pendirian BUMdesa disepakati melalui Musyawarah Desa, (2) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 89 mengatur hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk (a) pengembangan usaha; (b) pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 90 menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan; b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Menteri diatas dapat kita simpulkan bahwa keberadaan BUMDes harus dengan tujuan mensejahterakan masyarakat desa dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMDes. Akuntansi lingkungan pada BUMDes akan mengidentifikasi konsep akuntansi secara menyeluruh satu siklus akuntansi, mulai dari proses identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan terakhir pengungkapan. Akun yang difokuskan adalah baik biaya maupun pendapatan yang berkaitan dengan lingkungan dan sosial.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Menurut Sugiyono (2013:15) dalam Admizal & Fitri, (2018) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci pengambilan data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Data dan informasi yang terkait dengan penelitian berasal dari laporan tahunan BUMDes yang di teliti dan hasil wawancara dengan pihak terkait. Kemudian peneliti mereduksi data dengan memilih data-data yang penting. Penyajian data terkait laporan keuangan, untuk kemudian akan dijadikan bahan analisis deskripsi yang selanjutnya peneliti mentelaah dan menganalisis perlaporan keuangan BUMDes Jaya Mulya. Setelah dilakukan analisis, ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut.

Berikut daftar informan yang di wawancara antara lain :

N o	Jabatan/ Peran	Representasi /Instansi	Relevansi Informasi Yang di Gali
1	Sekretaris Desa	Pemerintah Desa Situmulya (Perwakilan Kepala Desa Selaku Komisaris BUMDes)	Regulasi dan Kebijakan Desa terkait dasar hukum pembentukan dan Kesepakatan AD/ART BUMDes.
2	Direktur BUMDes	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Mulya	Kebijakan strategis tata kelola BUMDes, arah pengembangan dan komitmen

			n manajemen terhadap gerakan ramah lingkungan (<i>Green Accounting</i>).
3	Bendahara BUMDes	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jaya Mulya	Alur pencatatan kas, proses penyusunan laporan keuangan, serta ada tidaknya pengakuan, pengukuran dan pelaporan biaya khusus lingkungan.
4	Masyarakat	Pelanggan / Warga Sekitar Lokasi Usaha BUMDes	Dampak riil operasional unit bisnis yang dirasakan (eksternalitas).

Tabel 1. Daftar Informan

Berdasarkan Tabel 1 di atas, penentuan informan dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menerapkan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono,

(2017:218) dalam Deriyanto & Qorib, (2018) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini dipilih secara sengaja dengan menetapkan kriteria tertentu yang benar-benar dianggap paling mengerti dan paham terkait regulasi dan tata kelola pelaksanaan BUMDes.

Adapun kriteria dan justifikasi pemilihan keempat informan ini adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa dipilih sebagai perwakilan dari Kepala Desa selaku Komisaris BUMDes. Sekretaris Desa memiliki pemahaman komperhensif mengenai regulasi pemerintahan desa, kebijakan tata ruang lingkungan desa, serta pertanggungjawaban terhadap kontribusi BUMDes bagi pendapatan desa.
2. Direktur BUMDes dipilih sebagai pimpinan tertinggi operasional BUMDes Jaya Mulya yang bertanggungjawab penuh atas arah kebijakan strategis, perencanaan, serta memiliki wewenang dalam komitmen penerapan konsep *Green Accounting*.
3. Bendahara BUMDes dipilih selaku pengelola keuangan internal yang menguasai siklus pencatatan keuangan, alokasi biaya operasional, serta penyusunan laporan keuangan. Kehadirannya krusial untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya pengakuan dan pengukuran biaya akuntansi lingkungan secara riil.
4. Warga dipilih sebagai perwakilan eksternal guna mendapatkan data objektif mengenai dampak nyata dari operasional ketiga unit usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Unit Usaha BUMDes Jaya Mulya

BUMDes Jaya Mulya Desa Situmulya saat ini mengelola tiga unit usaha utama yang

menjadi sumber pendapatan ekonomi desa. Ketiga unit tersebut diantaranya Jasa Listrik/PPOB (*Payment Point Online Bank*) yaitu Melayani pembayaran tagihan listrik dan kebutuhan token pulsa kWh. Yang kedua yaitu Jual beli ikan mas unit perdagangan komoditas lokal. Dan yang ketiga Ternak Domba yaitu unit usaha produktif di bidang peternakan yang baru diinisiasi pada tahun berjalan.

Dasar Hukum Pembentukan BUMDes

Dasar hukum pembentukan BUMDes Jaya Mulya di Desa Situmulya didasari oleh beberapa regulasi terikat yaitu UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, (Perda Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Desa Situmulya Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Wawancara Sekretaris Desa, 2026).

Analisis Rencana Kegiatan

Berdasarkan dokumen pembentukan BUMDes Jaya Mulya bahwa organisasi ini akan bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa, perdagangan sarana dan prasarana produksi pertanian, penyaluran sembako, pengelolaan energi pertambangan dan hasil bumi, pariwisata, perhubungan, pekerjaan umum dan berbagai usaha BUMDes yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensi desa (Wawancara Direktur BUMDes, 2026).

Upaya yang saat ini sedang dikelola dan dijalankan adalah bidang usaha Jasa Pelayanan Listrik (PPOB), Perikanan dan Peternakan. Pengelolaan ketiga unit usaha aktif tersebut memerlukan pemetaan rencana kegiatan yang terstruktur agar selaras dengan prinsip tata kelola yang berkelanjutan (*sustainable*).

Analisis Karakteristik Pencatatan Keuangan BUMDes

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan Bendahara BUMDes Jaya Mulya serta telaah dokumen laporan keuangan pada unit usaha Jasa Listrik (PPOB), unit Jual beli Ikan Mas dan Ternak Domba, ditemukan fakta bahwa tidak ada satu pun pos biaya yang dialokasikan khusus untuk kepentingan lingkungan. Laporan keuangan yang disajikan oleh BUMDes saat ini masih sangat konvensional dan berada pada level dasar, yakni hanya memuat pencatatan kas masuk dan keluar yang berorientasi pada pendapatan usaha dan akumulasi total keuntungan laba bersih.

Analisis Penerapan Green Accounting Pada Unit Usaha BUMDes

Berikut adalah laporan pencatatan keuangan BUMDes Jaya Mulya Desa Situmulya per Desember 2025.

Laporan Keuangan Unit Jasa Listrik Bulan Desember 2025

N o	Tanggal	Nama Produk	Vo l	Jumlah (Rp)
1	4/12/2025	PLN Postpaid	25	2,109,687
2	5/12/2025	PLN Postpaid	16	1,109,310
3	6/12/2025	PLN Postpaid	57	5,543,101
4	7/12/2025	PLN Postpaid	16	809,761
5	8/12/2025	PLN Postpaid	14	1,209,743

6	9/12/2025	PLN Postpaid	19	2,131,067
7	11/12/2025	PLN Postpaid	13	1,090,721
8	12/12/2025	PLN Postpaid	31	2,298,072
9	14/12/2025	PLN Prepaid	36	3,389,641
10	15/12/2025	PLN Postpaid	8	541,201
11	16/12/2025	PLN Postpaid	21	1,908,631
12	18/12/2025	PLN Prepaid	15	1,452,892
13	19/12/2025	PLN Postpaid	27	1,765,241
14	20/12/2025	PLN Postpaid	12	654,198
15	21/12/2025	PLN Prepaid	11	809,671
16	22/12/2025	PLN Postpaid	7	1,453,210
17	23/12/2025	PLN Prepaid	18	1,654,321
18	24/12/2025	PLN Postpaid	28	2,109,072
19	26/12/2025	PLN Prepaid	27	2,146,571
20	27/12/2025	PLN Postpaid	11	888,015

21	28/12/2025	PLN Prepaid	10	1,067,237
		Jumlah	422	36,141,363

Tabel 2. Laporan Keuangan Jasa Listrik Bulan Desember 2025
Sumber : Data Hasil Wawancara dan Telaah Dokumen

Laporan Penghasilan Bulan Desember 2025

No	Tanggal	Nama Produk	Vol	Harga Sat	Jumlah (Rp)
1	1/31/2025	Listrik/TOKEN	422	1.600	675,200
Jumlah Penghasilan					675,200

Tabel 3. Laporan Penghasilan Jasa Listrik Bulan Desember 2025
Sumber : Data Hasil Wawancara dan Telaah Dokumen

Laporan Penggunaan Bulan Desember 2025

No	Tanggal	Nama Produk	Vol	Harga Sat	Jumlah (Rp)
1	2/12/2025	OP TF Saldo	2x	100,000	200,000
Jumlah Penggunaan					200,000
Jumlah Penghasilan					675,200
Sisa Penghasilan					475,200

Tabel 4. Laporan Penggunaan Jasa Listrik Bulan Desember 2025
Sumber : Data Hasil Wawancara dan Telaah Dokumen

Pada unit usaha jasa listrik laporan bulan Desember 2025 menunjukkan performa

operasional yang paling stabil dengan volume transaksi mencapai 422 kali dalam bulan desember. Tentu jasa ini mengumpulkan jumlah dana sebesar Rp.36.141.363,- yang menghasilkan sisa penghasilan bersih sebesar Rp.475.200,-. Namun dalam sisi *Green Accounting*, pengeluaran operasional untuk jasa listrik ini dipandang sebagai biaya tunai biasa. Laporan tersebut menutup mata terhadap realitas di lapangan bahwa pencetakan struk fisik menggunakan kertas berpotensi menimbun limbah domestik yang mencemari lingkungan.

Bendahara BUMDes pada saat di wawancarai menyebutkan bahwa Tagihan listrik ini dilakukan secara manual dengan menggunakan metode penagihan dalam kertas atau struk (Wawancara Bendahara BUMDes, 2026). Meskipun sistem ini menimbulkan dampak pada limbah domestik kertas, masyarakat justru merasa jauh lebih nyaman dan menganggap metode penagihan ini jauh lebih gampang untuk dilakukan. Salah satu warga yang di wawancarai menyebutkan bahwa Keberadaan bukti struk kertas sangat penting karena memberikan kejelasan serta motivasi untuk membayar listrik (Wawancara Masyarakat, 2026).

Meskipun sistem pelaporan konvensional ini di kritik dari sudut pandang *Green Accounting* karena menimbulkan dampak penumpukan limbah kertas terhadap lingkungan, masyarakat justru merasa lebih nyaman dan menganggap metode ini jauh lebih gampang dilakukan. Jika sistem dipaksakan beralih ke tagihan online, banyak masyarakat yang tidak mengerti cara mengoperasikannya karena keterbatasan pemahaman teknologi digital. Lebih jauh lagi, mereka mengkhawatirkan bahwa peralihan ke sistem online ini menurunkan kesadaran

dan kedisiplinan masyarakat dalam membayar listrik tepat waktu.

Temuan ini memperlihatkan adanya tantangan berperilaku dan budaya masyarakat (*behavioral and culture accounting*) di tingkat akar rumput. Di sisi lain, BUMDes Jaya Mulya dituntut untuk melakukan digitalisasi untuk mengurangi biaya lingkungan (*environmental cost reduction*) tetapi di sisi lain fungsi sosial BUMDes terhadap pialr *People* harus tetap terjaga agar tidak menimbulkan kesulitan bagi warga desa yang menjadi pelanggan. Hal ini membuktikan bahwa untuk mewujudkan *Green Accounting* yang tangguh, peningkatan komitmen tidak hanya dibutuhkan dari sisi ineternal pengelola BUMDes saja, melainkan juga memerlukan edukasi yang bertahap agar kesadaran lingkungan dapat berjalan selaras sesuai kesiapan masyarakat setempat.

Laporan Keuangan Unit Penjualan Ikan Mas

N o	Tangg al	Prod uk	Vol(kg)	Har ga Satu an	Jumla h (Rp)
1	9/11/2025	Ikan Mas	20	45,00	900,00
2	11/11/2025	Ikan Mas	18	45,00	810,00
3	12/11/2025	Ikan Mas	12,5	45,00	562,50
4	14/11/2025	Ikan Mas	14	45,00	630,00
5	16/11/2025	Ikan Mas	18	45,00	810,00

6	17/11/2025	Ikan Mas	15	45,00	675,00
7	19/11/2025	Ikan Mas	13	45,00	585,00
8	20/11/2025	Ikan Mas	15	45,00	675,00
9	22/11/2025	Ikan Mas	17	45,00	765,00
10	24/11/2025	Ikan Mas	5,6	45,00	252,00
11	26/11/2025	Ikan Mas	11,5	45,00	517,50
12	27/11/2025	Ikan Mas	13	45,00	585,00
13	28/11/2025	Ikan Mas	9	45,00	405,00
14		Ikan Mas	21	45,00	945,00
Jumlah			202,6		9,117,000

Laporan Penghasilan Bulan November 2025

N o	Tangg al	Prod uk	Vol(kg)	Har ga Satu an	Jumla h (Rp)
	1-30/11/25	Ikan Mas	202,6	5,00	1,013,000
Jumlah Penghasilan					1,013,000

Tabel 5. Laporan Penjualan Ikan Mas Bulan November 2025

Sumber : Hasil Wawancara dan Telaah Dokumen

**Laporan penjualan Ikan Mas Bulan
Desember 2025**

N o	Tangg al	Prod uk	Vol(kg)	Har ga Satu an	Jumla h (Rp)
1	6/11/2025	Ikan Mas	11	45,00	900,00
2	8/11/2025	Ikan Mas	16	45,00	810,00
3	10/11/2025	Ikan Mas	15	45,00	562,50
4	12/11/2025	Ikan Mas	10	45,00	630,00
5	14/11/2025	Ikan Mas	7	45,00	810,00
6	16/11/2025	Ikan Mas	16	45,00	675,00
7	17/11/2025	Ikan Mas	7	45,00	315,00
8	19/11/2025	Ikan Mas	9	45,00	585,00
		Juml ah	91		3,780,000

**Laporan Penghasilan Bulan November
2025**

N o	Tangg al	Prod uk	Vol(kg)	Har ga Satu an	Jumla h (Rp)
1	1-30/11/25	Ikan Mas	91	5,00	455,00
Jumlah Penghasilan					455,00

**Tabel 6. Laporan Penjualan Ikan Mas
Bulan Desember 2025**

**Sumber : Hasil Wawancara dan Telaah
Dokumen**

Pada unit usaha jual beli ikan mas, laporan mencatat volume penjualan komoditas lokal yakni sebesar Rp.9.117.000,- pada bulan November dan menurun menjadi Rp.3.780.000,- pada bulan Desember dengan laba bersih selama dua bulan ini mendapatkan Rp.1.468.000,- meskipun keuntungan dari unit usaha ini berhasil didistribusikan untuk pilar *People* (sosial) melalui bagi hasil PADes untuk pembangunan desa. Tetapi hasil wawancara dan telaah dokumen pilar *Palnet* (lingkungan) di dalam laporan keuangan tersebut bernilai nol atau tidak ada sebagian kecil pun dari laba untuk biaya lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, unit usaha ini menghasilkan limbah anorganik berupa plastik. Berdasarkan wawancara dengan Bendahara BUMDes menyebutkan bahwa ikan mas yang dijual dalam kondisi hidup di bungkus dengan menggunakan kantong plastik berisi air agar memudahkan para pembeli untuk membawanya pulang (Wawancara Bendahara BUMDes, 2026). Akumulasi kantong plastik yang terjadi secara terus menerus ini menjadi sumber limbah eksternalitas negatif utama bagi lingkungan pemukiman warga apabila tidak dikelola dengan bijak. Di sisi lain, untuk limbah organik yang dihasilkan dari proses kegiatan penampungan ikan hanya memproduksi limbah kotoran di area kolam itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, ikan mas yang diperjualbelikan akan dipisahkan terlebih dahulu menggunakan jaring khusus agar tidak tercampur dengan ikan lainnya di sekitar kolam. Pihak pengelola kolam ikan menyebutkan bahwa sisa-sisa limbah kotoran ikan mas yang di sekat menggunakan jaring tersebut akan langsung hanyut terbawa arus dan terurai di kolam ikan sekitarnya (Wawancara Pengelola Kolam, 2026).

Temuan ini memberikan gambaran riil bagi sistem akuntansi BUMDes dari perspektif *Green Accounting*. Meskipun unit usaha ini memberikan kontribusi ekonomi bagi pendapatan desa, sisa limbah plastik dari pembungkus ikan serta sisa kotoran yang terurai di kolam sekitar selama ini belum teridentifikasi dalam catatan keuangan. Biaya penanganan kantong plastik ramah lingkungan atau biaya pemeliharaan kebersihan ekosistem kolam dari endapan kotoran belum diakui sebagai beban lingkungan. Realitas ini mempertegas bahwa BUMDes Jaya Mulya perlu mulai mereklasifikasi dan memasukkan biaya penanggulangan dampak limbah tersebut ke dalam akun biaya lingkungan agar pelaporan keuangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit*), melainkan juga pada kelestarian bumi.

Temuan dari lapangan menunjukkan bahwa sistem akuntansi yang diharapkan pada BUMDes Jaya Mulya masih berada pada level sangat dasar.

Laporan Keuangan Unit Ternak Domba

Unit usaha ternak domba merupakan unit bisnis baru yang sedang dijalankan oleh BUMDes Jaya Mulya. Meskipun hingga saat ini belum memiliki alokasi anggaran khusus dari internal BUMDes untuk biaya pengolahan limbah ataupun pemeliharaan area sekitar kandang, terdapat sebuah inisiatif sosial yang menjadi solusi nyata atas potensi risiko ekologis tersebut.

Dalam pelaksanaannya, limbah kotoran yang dihasilkan dari aktivitas peternakan domba ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pupuk. Dalam wawancara dengan masyarakat dikatakan bahwa limbah dari domba ini secara rutin diambil dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk dijadikan sebagai pupuk alami bagi lahan pertanian (Wawancara Masyarakat,

2026). Langkah kolaboratif ini murni berjalan atas kesadaran bersama tanpa melibatkan transaksi finansial formal di dalam catatan keuangan BUMDes. Karena tidak ada pos biaya khusus yang dianggarkan oleh BUMDes, mekanisme pengambilan limbah oleh warga ini menjadi sebuah langkah taktis dan strategis yang efektif untuk mencegah penumpukan kotoran sehingga lingkungan sekitar kandang tetap terjaga dan terhindar dari pencemaran.

Dari perspektif *Green Accounting*, fenomena ini menunjukkan adanya bentuk kepedulian lingkungan yang bersifat swadaya. Namun, agar tata kelola usaha ini menjadi lebih tangguh dan terstruktur sesuai pilar *Planet* dalam prinsip *Tiple Bottom Line*, BUMDes Jaya Mulya di masa depan tetap perlu mencatat dan mengidentifikasi hubungan timbal balik ini. Pola pengelolaan limbah gratis yang bermanfaat bagi masyarakat (*people*) dan alam (*planet*) ini sebaiknya mulai diakui dan diungkapkan secara eksplisit dalam laporan non-keuangan sebagai bagian dari komitmen nyata BUMDes menuju tata kelola usaha desa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Relevansi Hasil Temuan Dengan *Triple Bottom Line*

Pendekatan *Triple Bottom Line* menuntut entitas untuk menyeimbangkan tiga aspek utama : Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Berikut adalah kaitan antara hasil wawancara dengan ketiga pilar tersebut :

Pilar	Analisis Kondisi Pada BUMDes Jaya Mulya
Profit (Ekonomi)	Merupakan fokus utama saat ini. Pencatatan yang hanya berupa pemasukan dan

	pengeluaran membuktikan bahwa orientasi BUMDes masih terbatas pada kelangsungan finansial jangka pendek dan pencapaian laba untuk PADes.
People (Sosial)	Asepk ini mulai terpenuhi melalui mekanisme bagi hasil dan alokasi dana untuk masyarakat desa melalui PADes. Namun, kesadaran sosial terkait dampak aktivitas usaha terhadap kenyamanan lingkungan masyarakat sekitar bekum terukur secara formal dalam laporan.
Planet (Lingkungan)	Pilar ini adalah yang paling lemah dalam implementasinya. Aktivitas pencetakan struk manual dan ketiadaan anggaran pengelolaan limbah ternah menunjukkan bahwa asepk "Planet" belum terintegrasi dalam sistem manajemen maupun akuntansi BUMDes.

Perlakuan Akuntansi Lingkungan Dilihat Dari Segi Pengguna

Sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Yuliarti & Wulandari, (2023) Akuntansi lingkungan dapat dibedakan dari segi pengguna menjadi; akuntansi keuangan, akuntansi manajemen dan akuntansi biaya. Di sisi lain, esensi dari *Green Accounting* didasarkan pada teori

Triple Bottom Line yang digagas oleh Elkington, (2001) yang menekankan keseimbangan dinamis antara aspek ekonomi (*profit*), sosial (*people*), dan kelestarian bumi (*planet*).

Pada BUMDes Jaya Mulya Desa Situmulya, perlakuan akuntansi lingkungan dari sudut pandang ketiga jenis pengguna tersebut apabila dibedah menggunakan kacamata *Triple Bottom Line* menunjukan kondisi dan tantangan sebagai berikut :

1. Pengguna Akuntansi Keuangan Dalam Perspektif Ekonomi (*Profit*)

Aktivitas akuntansi di tingkat ini murni berorientasi pada pilar *Profit* di mana laporan keuangan hanya merekam arus kas masuk dan kas keluar demi mengukur pendapatan usaha dan akumulasi total keuntungan laba bersih yang nantinya disetorkan untuk bagi hasil dengan desa dan BUMDes. Sebagai contoh konkret, laporan keuangan unit jasa listrik mampu menyajikan perputaran dana begitu besar. Dari sudut pandang akuntansi keuangan, laporan tersebut dinilai berhasil secara finansial. Akan tetapi, laporan ini masih menutup mata terhadap dimensi ekologi karena belum menyajikan akun khusus lingkungan yang mencerminkan eksternalitas negatif dari operasional usaha.

2. Pengguna Akuntansi Manajemen Dalam Perspektif Sosial (*People*)

Pada BUMDes Jaya Mulya, pengguna akuntansi manajemen dihadapkan pada dilema berperilaku dan budaya masyarakat lokal (*behavioral and cultururer accounting*). Di sisi lain, dari perspektif manajerial, BUMDes dituntut untuk melakukan digitalisasi untuk mengurangi buaya lingkungan seperti membatasi penggunaan kertas struk. Namun di satu sisi, hasil observasi menunjukan bahwa

masyarakat desa merasa jauh lebih nyaman dan disiplin membayar tagihan jika menggunakan struk fisik karena memberikan kejelasan. Apabila manajemen memaksakan peralihan sistem ke arah online secara terburu-buru, keterbatasan pemahaman teknologi digital desa dikhawatirkan justru akan menurunkan kedisiplinan warga dalam membayar listrik.

3. Pengguna Akuntansi Biaya Dalam Perspektif Bumi (*Planet*)

Pilar *Planet* ini merupakan titik paling lemah dalam perlakuan akuntansi biaya di BUMDes Jaya Mulya. Hingga saat ini, belum ada anggaran khusus untuk kepentingan konservasi atau pengelolaan dampak lingkungan. Pada unit usaha jasa listrik, pengeluaran kertas struk masih dipandang sebagai biaya tunai operasional biasa tanpa ada taksiran biaya nyata untuk mengendalikan sampah domestik kertas yang dihasilkan. Kondisi serupa terjadi pada produksi ikan mas dan ternak domba. Limbah operasional peternakan domba dan sisa aktivitas kolam ikan belum diidentifikasi, diklasifikasi maupun diakui ke dalam pos biaya lingkungan secara sistematis dalam catatan akuntansi biaya mereka.

Perlakuan Akuntansi Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Desa

Untuk memahami secara mendalam bagaimana akuntansi lingkungan dapat diimplementasikan demi mewujudkan *Green Accounting* pada BUMDes, perlakuan akuntansi tidak hanya dipandang sebagai alat pencatatan finansial semata. Siklus perlakuan akuntansi lingkungan yang komprehensif wajib di telaah secara bertahap melalui lima pilar utama proses akuntansi yaitu, identifikasi, pengakuan, pengukuran,

penyajian dan pengungkapan. Kelima tahap ini berfungsi sebagai instrumen penguku untuk melihat sejauh mana entitas mampu menyelaraskan pilar ekonomi (*profit*), tuntutan masyarakat (*people*), dan tanggung jawab menjaga kelestarian alam (*planet*) sesuai dengan teori *Triple Bottom Line* serta Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

1. Identifikasi merupakan fondasi awal di mana pengelola entitas dituntut memetakan, mengenali dan memisahkan pengeluaran operasional murni dari biaya-biaya yang timbul akibat eksternalitas negatif lingkungan. Dalam konteks operasional BUMDes, unit usaha yang berjalan seperti unit pelayanan jasa listrik, budidaya dan peternakan secara nyata berinteraksi dengan lingkungan hidup baik dalam bentuk konsumsi sumber daya alam maupun produksi limbah. Namun, hasil analisis riil menunjukkan bahwa proses identifikasi biaya lingkungan pada BUMDes sering kali belum berjalan optimal.
2. Pengakuan dalam hal ini, yaitu menentukan kapan suatu objek dampak ekologis layak dicatat secara formal ke dalam sistem pembukuan sebagai aset, liabilitas, beban atau pendapatan. Jika dikorelasikan dengan PSAK 57 suatu beban atau kewajiban estimasi lingkungan wajib diakui dalam laporan keuangan apabila terdapat kewajiban masa kini yang lahir dari peristiwa masa lalu, dan besar kemungkinan memerlukan arus keluar sumber daya ekonomi untuk menyelesaikannya. Fakta dilapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan PSAK 57 dengan praktik pengakuan BUMDes. Pengelola BUMDes belum mengakui adanya elemen akuntansi lingkungan di dalam laporan

keuangannya. Sebagai contoh, ketika manajemen dihadapkan pada pilar sosial di mana budaya masyarakat masih menuntut penggunaan kertas fisik dibandingkan dengan sistem online manajemen memilih untuk mengakomodasi kebutuhan sosial tersebut. Namun, implikasi dari keputusan sosial ini langsung diakui sebagai beban administrasi tanpa pemisahan akun hijau. Begitu pula dengan aktivitas pengelolaan limbah dengan tidak adanya sistem pembukuan yang baku dan kurangnya pemahaman konsep biaya restorasi, seluruh kegiatan pelestarian tersebut lewat begitu saja tanpa diakui secara formal dalam pencatatan keuangan.

3. Pengukuran dalam hal ini baru menyentuh proses dimensi ekonomi (*profit*). Jika dikaitkan dengan standar PSAK 16 (Aset Tetap) atau metode akuntansi biaya lingkungan, pengukuran untuk pilar *planet* dan *people* hampir sepenuhnya diabaikan. BUMDes belum memiliki instrumen untuk mengukur berapa nilai kerugian ekologis akibat sampah domestik operasional yang dihasilkan, atau berapa taksiran biaya pasti yang dibutuhkan untuk menetralkan limbah sisa usaha agar terhenti karena tidak adanya metode standar akuntansi hijau yang diaplikasikan di tingkat pemerintah desa.
4. Penyajian akuntansi lingkungan mengatur mengenai tata letak dan struktur penempatan pos-pos akuntansi dalam komponen laporan keuangan. Sesuai amanat PSAK 1 (Penyajian Laporan Keuangan), laporan keuangan wajib menyajikan secara wajar posisi keuangan dan kinerja entitas dengan mengklasifikasikan akun-akun sejenis secara terstruktur. Laporan keuangan yang dihasilkan setiap akhir periode

masih sangat sederhana, didominasi oleh bentuk laporan kas masuk dan kas keluar. Dampak dari model penyajian yang sederhana ini adalah tidak tersajinya akun biaya lingkungan secara terpisah pada laporan keuangan. Akibatnya pemerintah desa maupun masyarakat selaku pemilik modal tidak dapat melihat penyajian klasifikasi pos aset hijau (*green asset*) atau kewajiban hijau (*green liabilities*) untuk menilai sejauh mana BUMDes berkomitmen menjaga kelestarian bumi.

5. Pengungkapan akuntansi lingkungan pada BUMDes berada pada level paling sederhana. Fokus pengungkapan pengelola murni hanya pada kelangsungan finansial jangka pendek. Informasi mengenai pilar sosial baru terungkap secara implisit melalui skema pembagian hasil dari laba tersebut. Sementara itu, pilar lingkungan menjadi dimensi yang paling terpinggirkan karena sama sekali tidak ada pengungkapan naratif maupun catatan kaki dalam laporan keuangan yang mempertegas mitigasi limbah dari hasil usaha atau konservasi alam sekitar. Pengelola BUMDes belum mengkomunikasikan hubungan timbal balik yang seimbang antara aktivitas bisnis dengan kelestarian alam secara tertulis kepada publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kualitatif yang mendalam terhadap aktivitas operasional BUMDes Jaya Mulya di Desa Situmulya, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi green accounting pada BUMDes Jaya Mulya belum terwujud karena sistem pelaporan keuangan yang digunakan masih bersifat konvensional dan hanya berorientasi pada pilar profit (ekonomi). Berdasarkan kerangka *Triple*

Bottom Line pilar people (sosial) baru terpenuhi secara parsial melalui kontribusi PADes dan akomodasi kebutuhan lainnya sesuai AD/ART. Namun, pilar planet (bumi) menjadi titik paling lemah karena eksternalitas negatif dari setiap unit usaha seperti limbah kertas struk, kantong plastik dan pengelolaan kotoran kandang belum diidentifikasi ataupun diakui sebagai biaya lingkungan (environmental cost) ke dalam pos laporan keuangan. Secara normatif, siklus akuntansi yang berjalan belum selaras dengan standar regulasi PSAK 1, PSAK 16 dan PSAK 57. BUMDes Jaya Mulya belum mengaplikasikan instrumen yang sistematis dalam tahap identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian hingga pengungkapan akun-akun hijau (green accounting).

SARAN

Untuk menjembatani kesenjangan implementasi green accounting, BUMDes Jaya Mulya bersama Pemerintah Desa

Situmulya perlu merekonstruksi AD/ART sebagai acuan alokasi biaya lingkungan. Secara teknis, pengelola keuangan harus mulai mengidentifikasi dan mereklasifikasi pos pengeluaran konvensional ke dalam akun biaya hijau, seperti kantong plastik biodegradable pada unit ikan mas dan pengelolaan limbah kertas pada unit jasa listrik. Selain itu, digitalisasi struk pembayaran perlu dilakukan secara bertahap didampingi edukasi insentif masyarakat guna menekan sampah kertas tanpa mengorbankan kenyamanan (people). Inisiatif swadaya pemanfaatan kotoran domba oleh warga juga harus diformalisasikan melalui pengungkapan naratif pada laporan tahunan sebagai bentuk akuntabilitas pilar planet. Yang terakhir adalah seluruh langkah strategis ini wajib didukung oleh peningkatan SDM pengelola melalui bimbingan teknis akuntansi lingkungan yang selaras dengan standar PSAK 1, PSAK 16, dan PSAK 57 secara berkala.

REFERENSI

- Admizal, & Fitri, E. (2018). *Pendidikan Nilai Kepedulian Sosial Pada Siswa Kelas V Di Sekolah Dasar*. 3(I), 163–180. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/gentala.v3i1.6778>
- Deriyanto, D., & Qorib, F. (2018). *Persepsi mahasiswa universitas tribhuwana tunggadewi malang terhadap penggunaan aplikasi tik tok*. 7(2), 77–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.33366/jisip.v7i2.1432>
- Elkington, J. (2001). The triple bottom line for 21st century business. *The Earthscan Reader in Business and Sustainable Development*, 136, 20–43. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hRJGrsGnMXcC&oi=fnd&pg=PA49&dq=The+triple+bottom+line&ots=0grDCRPzbH&sig=eoFfSv_97xbVWwzclus-UKJOk7Q&redir_esc=y#v=onepage&q=The triple bottom line&f=falsefalse
- Kurniawan, A., & Mustofa, U. A. (2022). PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN BADAN USAHA MILIK DESA UNTUK MEWUJUDKAN GREEN ACCOUNTING BADAN USAHA MILIK DESA ADIJAYA LAMPUNG TENGAH. *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan*, 5(2), 86–99. <https://doi.org/10.24127/jf.v5i1.695>
- Kusumaningtias, R. (2013). Green Accounting, Mengapa dan Bagaimana? *Akuntansi Dan Keuangan*, 7(2), 978–979. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=IIuP92QAAA&AJ&cstart=100&pagesize=100&sortby=pubdate&citation_for_view=IIuP92QAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
- Lalo, A., & Hamiddin, M. I. N. (2021). the Influence of Environmental Costs and

- Environmental Performance on Profitability in Manufacturing Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(1), 196–204. <http://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak@page196>
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (2011). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/20353/perda-kab-lebak-no-9-tahun-2011>
- Peraturan Desa Situmulya Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, 1 (2010). <https://www.kemendagri.go.id/>
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, Database Peraturan (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021>
- Pratiwi, M. W. (2013). AKUNTANSI LINGKUNGAN SEBAGAI STRATEGI PENGELOLAAN DAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR. *Akuntansi Keuangan*, 2(Vol. 2 No. 1 (2013): AKUNESA (September 2013)), 1–19.
- Reza, H. K., Judianto, L., Susanty, M., & Varera, R. V. (2025). PERAN STRATEGIS KEMITRAAN BUMDES DALAM PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN DI INDONESIA. 8(Vol. 8 No. 1 (2025): September), 44–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.32663/s2dtc594>
- States, U. (1995). An Introduction to Environmental Accounting as a Business Management Tool. *The Green Bottom Line*, 61–85. <https://doi.org/10.4324/9781351283328-2>
- Suningsih, S. L. P. Y., Pramitari, I. G. A. A., & Mandia, I. N. (2021). Analisis Implementasi Akuntansi Lingkungan Pada Badan Usaha Milik Desa: Studi Kasus pada Unit Pemungutan Sampah BUMDes Buduk Badung. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 17(1), 71–77. <https://doi.org/10.31940/jbk.v17i1.2471>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 45 (2014). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan .Bpk.Go.Id 31 (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Yuliarti, N. C., & Wulandari, D. (2023). Akuntansi lingkungan pada BUMDes Karya Mandiri untuk mewujudkan green accounting. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 5, 372–380. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art43>
- Zenbird.media. (2025). 3 pillars of sustainability and the triple bottom line. Zenbird. <https://zenbird.media/3-pillars-of-sustainability-and-the-triple-bottom-line/>